

**ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Diah Rohmawati

NIM. 49402000010

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2023**

**ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Diah Rohmawati

NIM. 49402000010

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Rohmawati

NIM : 49402000010

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul: “Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak” merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 8 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Diah Rohmawati

NIM. 49402000010

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Diah Rohmawati

NIM : 49402000010

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 8 Februari 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



(Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA)

NIDN: 0628106301

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Diah Rohmawati

NIM : 49402000010

Program Studi : D-III Akuntansi


Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 21 Februari 2023

Penguji 2,

Penguji 1,


(Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA)


NIDN: 0628106301


/Drs. Osmad Muthaheer, MSi

NIDN: 0711046401

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA

23-2-23


Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak

NIDN: 0612078902

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat waktu tanpa ada halangan apapun. Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya (D-III) Akuntansi. Tugas Akhir ini berjudul Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini;

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi
3. Bapak Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, masukan dan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Heru Subi Pranoto, S.E., M.M. selaku Kepala Suku Bagian Keuangan yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Bagian Keuangan Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

5. Kedua Orang Tua tercinta Ibu Siti Akromah dan Bapak Supriyadi yang senantiasa memberi doa dan dukungan dengan sepenuh hati agar penulis mampu menyelesaikan laporan magang dengan baik.
6. Terimakasih untuk keluarga, sahabat dan teman-teman yang senantiasa mendukung, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2020 yang telah mendukung dalam hal apapun, semoga kedepannya kita semua sukses dan menjadi orang yang bermanfaat dalam mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan aamiin.

Penulis menyadari bahwa TA ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap tugas kali ini agar menjadi TA yang baik.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak dan semoga TA ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 Februari 2023

Penyusun,

Diah Rohmawati

NIM. 49402000010

ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Diah Rohmawati

Program Studi (Diploma) DIII-Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang digunakan oleh Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Demak untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah sebagai informasi untuk tersedia bagi publik sebagai sumber pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil survei ini menunjukkan program SIPD-nya di Kanwil Kabupaten Demak cukup efektif. Kesalahan kecil yang biasanya terjadi adalah masih adanya kesalahan jaringan pada saat evaluasi pada input. Sehingga penggunaan SIPD tetap dapat dicapai dengan menggunakan aplikasi pendamping SIMDA/FMIS untuk mencapai tujuan, program tepat waktu dan melakukan perubahan.

Kata Kunci : Sistem Informasi, SIPD, Efektifitas, Program

ABSTRACT

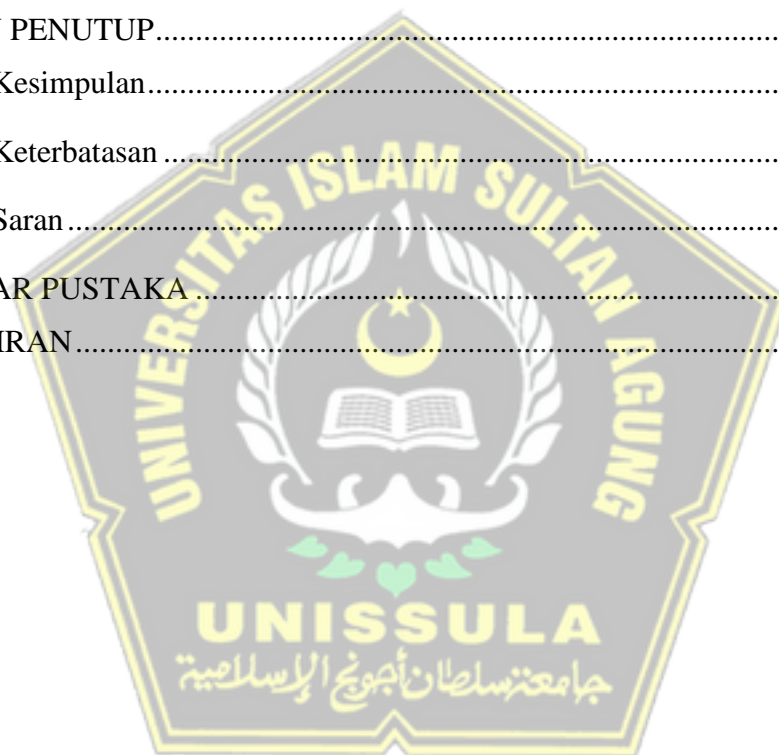
The Regional Government Information System (SIPD) is an information system used by the Regional Secretariat Office (Setda) of Demak Regency to document, manage and process regional development planning data as information to be made available to the public as a source of decision making. This study uses qualitative methods and data collection techniques used are primary and secondary data obtained from observation, interviews and documentation. The results of this survey show that the SIPD program in the Regional Office of Demak Regency is quite effective. A small error that usually occurs is that there is still a network error when evaluating the input. So that the use of SIPD can still be achieved by using the SIMDA/FMIS companion application to achieve goals, program on time and make changes.

Keyword : Information System, SIPD, Effectiveness, Program

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | lv |
| ABSTRAK | lviii |
| DAFTAR ISI..... | lix |
| DAFTAR TABEL..... | lxi |
| DAFTAR GAMBAR | lxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1. Sistem Informasi..... | 6 |
| 2.1.1. Pengertian Sistem | 6 |
| 2.1.2. Pengertian Sistem Informasi..... | 6 |
| 2.1.3. Komponen Sistem Informasi | 7 |
| 2.2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) | 8 |
| 2.3. Sistem Informasi Terhadap Kualitas Informasi..... | 13 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 14 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 14 |
| 3.2. Objek Penelitian | 14 |
| 3.3. Definisi Operasional..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4. Metode Pengumpulan Data | 16 |
| 3.5. Teknik Analisis Data | 18 |
| BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN | 20 |
| 4.1. Gambaran Umum Institusi | 20 |
| 4.1.1. Sejarah Umum Institusi | 20 |
| 4.1.2. Struktur Organisasi | 22 |
| 4.1.3. Mekanisme Pengajuan SPP (Surat Pemerintah Pembayaran) | 24 |
| 4.1.4. Hasil Pengamatan | 27 |
| 4.1.5. Pembahasan | 28 |
| BAB V PENUTUP..... | 32 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 32 |
| 5.2. Keterbatasan | 33 |
| 5.3. Saran..... | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 34 |
| LAMPIRAN..... | 35 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1: Perbandingan Teori dengan Praktek yang Ditemui di Lapangan serta Kefektifannya..... | 31 |
|--|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1: Tampilan Halaman Utama SIPD..... | 8 |
| Gambar 2 : Alur Informasi Pembangunan Daerah pada SIPD..... | 10 |
| Gambar 3 : Tampilan Hasil Informasi Keuangan Daerah..... | 11 |
| Gambar 4 : Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Demak..... | 23 |
| Gambar 5 : Alur Pengajuan SPP-GU..... | 26 |
| Gambar 6 : Alur Pengajuan SPP-TU..... | 27 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, pentingnya sistem informasi dalam menghadapi kecanggihan yang terus meningkat dan perkembangan pengetahuan teknis yang semakin meningkat berdampak besar pada kebutuhan manusia. Pembangunan ditandai dengan munculnya inovasi yang memfasilitasi kebutuhan manusia. Sistem informasi membantu membuat laporan eksternal, mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan manajemen, dan menerapkan kontrol internal. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tujuan dibuatnya sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi untuk mengelola kegiatan keuangan, untuk meningkatkan tingkat keandalan informasi akuntansi, untuk menyediakan catatan akuntabilitas yang lengkap, dan untuk menyediakan keuangan lembaga ini termasuk melindungi aset.

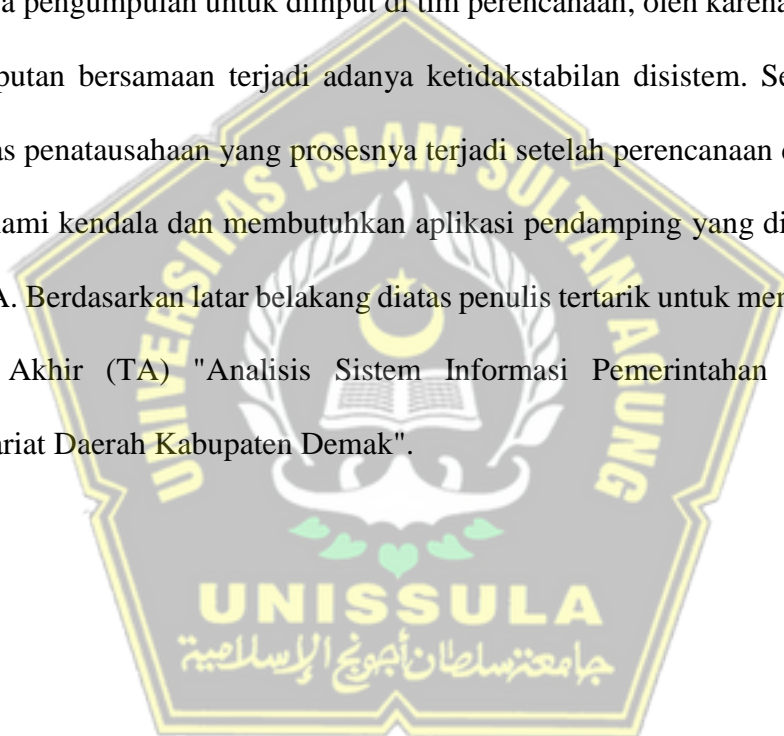
Dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah Kab. Demak menyusun LKPD dengan berpedoman pada SAP diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, maka penyusunan laporan keuangan tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar akuntansi untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Secara khusus, basis ini mengakui pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual berarti bahwa pendapatan diakui ketika hak pendapatan

terpenuhi, bahkan jika rekening kas daerah belum dikreditkan dengan uang tunai. Sebaliknya, digunakan untuk pendapatan LRA, beban dan pendapatan pinjaman secara tunai dan diakui pada saat kas dikreditkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk membangun sistem informasi yang akurat, Kemendagri membentuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah “SIPD”. Sebagai aplikasi yang membantu kelancaran koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah salah satunya OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Penggunaan aplikasi dimulainya tahun 2020 untuk pengoperasional aktivitas pelayanan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dengan mengikuti peraturan pemerintah pusat dengan menggunakan layanan aplikasi SIPD. Dalam sistem ini memuat beberapa sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah. Sistem informasi yang digunakan membantu menyediakan informasi perencanaan penganggaran daerah, informasi penegakan dan pengelolaan, informasi pelaporan, informasi barang milik daerah, dan lainnya.

Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Demak merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah (Bupati) dalam menyusun kebijakan dinas-dinas daerah dalam pelaksanaannya. Dengan memperkuat dan mengoptimalkan layanan kinerja tahap perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Demak memanfaatkan aplikasi atau web SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang biasanya digunakan untuk melakukan perencanaan 1 periode. Sedangkan dalam pelaksanaannya bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam melaksanakan aktivitasnya memerlukan indikator penunjang operasional dan sebagian

penggunaan aktivitas berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi yang modern. Sistem Informasi yang memudahkan dalam penyusunan data yang digunakan bendahara pengeluaran yaitu SIMDA Keuangan/FMIS. Oleh karena itu, apabila manajemen yang baik mempercepat kinerja organisasi. Dalam beberapa kegiatan penginputan data perencanaan anggaran terdapat penginputan yang tidak sesuai waktu dikarenakan ada beberapa bagian di instansi yang pengumpulan dokumennya kurang sesuai waktu dan adanya revisi yang mengakibatkan kurang tepatnya pengumpulan untuk diinput di tim perencanaan, oleh karena itu, pada saat penginputan bersamaan terjadi adanya ketidakstabilan di sistem. Sehingga untuk aktivitas penatausahaan yang prosesnya terjadi setelah perencanaan dalam instansi mengalami kendala dan membutuhkan aplikasi pendamping yang digunakan pada SIMDA. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul Tugas Akhir (TA) "Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak".



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan di Setda Kab. Demak?
2. Bagaimana efektivitas sistem SIPD yang digunakan Sekretariat Daerah Kab. Demak?
3. Bagaimana dampak penerapan (SIPD) di Sekretariat Daerah Kab. Demak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan kinerja di Sekretariat Daerah Kab. Demak.
2. Memberikan informasi tentang keefektifan sistem yang digunakan pegawai terkait di Sekretariat Daerah Kab. Demak.
3. Memberikan informasi pengaruh penggunaan Sistem Informasi yang sudah digunakan di Sekretariat Daerah Kab. Demak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teori Praktis

Menjadi objek penelitian dan diharapkan menjadi gambaran tentang sistem informasi pemerintahan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dan menjadi rujukan dalam memperbaiki serta peningkatan keefektifan sistem informasi yang sudah digunakan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat referensi untuk melakukan analisis dan penelitian mengenai sistem informasi pemerintahan yang sesuai dengan (SAP) standar akuntansi pemerintahan.

2. Teori Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam mengembangkan sistem informasi pemerintahan. Sebagai bahan masukan kepada organisasi Sekretariat Daerah Kab. Demak tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi

2.1.1. Pengertian Sistem

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2008). Dalam pembahasan lain menurut (Lestari, 2020) sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah gabungan dari beberapa komponen, yang dimana suatu komponen tersebut berhubungan dengan komponen lainnya yang berguna mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan pemanfaatan komponen didalamnya. Sistem pemerintahan sangat penting karena sangat mendukung kinerja bisnis dan lembaga pemerintah daerah, besar dan kecil.

2.1.2. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerjasama dengan menghasilkan satu informasi yang berguna memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi maupun kelompok (Maydianto, 2021). Dalam penelitian lain menurut (Wahyudi, 2019) sistem informasi didefinisikan sebagai sejumlah komponen yang dimana komponen

itu saling berhubungan satu dengan lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan beberapa ahli terdahulu penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa sistem informasi adalah komponen sistem yang digunakan organisasi dengan tujuan memberikan informasi yang dibutuhkan seperti memberikan keputusan. Perkembangan sistem informasi telah membawa perubahan besar dalam pengambilan keputusan di tingkat operasional disuatu pemerintahan daerah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, membuat semua orang semakin autentik dan tepat waktu. Semua instansi, khususnya instansi pemerintah daerah, menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai aktivitasnya secara elektronik, dengan itu akan membuat pegawai yang menggunakan teknologi merasa dibantu dengan adanya perkembangan yang terjadi.

Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintah diindikasikan agar organisasi di dalam instansi tersebut dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Aplikasi sistem informasi dapat memberikan kemudahan bagi pengguna itu sendiri. Aplikasi sistem informasi dicirikan bahwa sistem tersebut fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas.

2.1.3. Komponen Sistem Informasi

Suatu sistem informasi dalam penggunaannya didukung oleh beberapa komponen yang fungsinya sangat penting bagi sistem informasi tersebut.

Komponen-komponen yang terdapat di sistem informasi menurut (Zakaria, 2022) diantaranya sebagai berikut:

1. Perangkat keras, merupakan komponen yang mengacu pada perangkat fisik seperti printer atau komputer.
2. Perangkat lunak, merupakan hal yang dapat memproses perintah atau instruksi yang memungkinkan perangkat keras memproses data.
3. Prosedur, merupakan kumpulan seperangkat aturan yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data dan menghasilkan output yang diinginkan.
4. Pengguna atau SDM, merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab didalam mengembangkan sistem, penginputan dan juga penggunaan output informasi sistem.
5. Jaringan Komputer atau Database, merupakan sistem jaringan yang koneksi untuk menghubungkan sumber daya yang digunakan dan diakses oleh banyak pengguna.

2.2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



Gambar 1: Tampilan Halaman Utama SIPD

SIPD adalah sistem pendokumentasian, pengelolaan, dan pengolahan data pembangunan daerah menjadi informasi bagi masyarakat dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, pemanfaatan implementasi SIPD adalah untuk mengoptimalkan penggunaan data dan informasi pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan kesepakatan berdasarkan Pasal 23 Pasal 391 UU 2014 yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pemanfaatan SIPD ditonjolkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, SIPD akan lebih adaptif, responsif dan dinamis. Dan dirancang untuk menjadi inovatif, Akuntabilitas telah diluncurkan di kota.

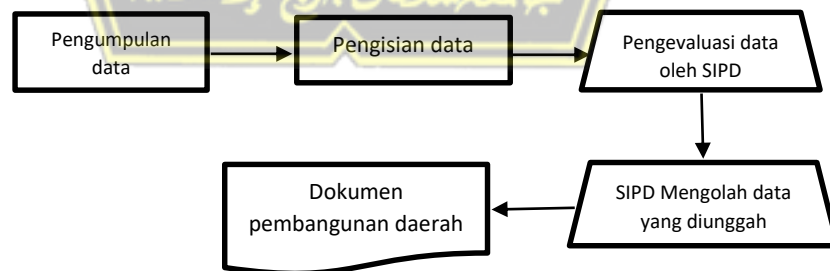
Fungsi dalam aplikasi SIPD untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah yaitu berikut diantaranya:

1. Penyatuan acuan nasional
2. Proses perencanaan dan keuangan daerah dapat lebih mudah dilakukan secara elektronik
3. Perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dievaluasi menggunakan sistem elektronik.
4. Empat. Database pembangunan dan keuangan nasional dan daerah
5. Lebih mudah menganalisis data daerah secara nasional.

Implementasi tata kelola berbasis SPBE yang terintegrasi secara nasional sangat penting untuk mencapai good governance dan menghasilkan data Indonesia yang akurat dan terintegrasi dari daerah ke pusat. Untuk itu diterbitkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur jenis-jenis SIPD yang dapat dikembangkan pemerintah daerah menjadi kelompok-kelompok berikut:

1. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintah daerah dapat mengelola data dan informasi dengan memasukkan berbagai elemen yang terkait dengan rencana revitalisasi daerah. SIPD juga dapat memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD dan RENJA PD sehingga analisis dan profil praktik pembangunan daerah dapat dengan mudah diperoleh dan menjadi dasar data dan pemutakhiran rencana pembangunan daerah. Bisa menginformasi lokasi geografi, demografi, potensi sumber daya lokal, ekonomi dan keuangan lokal, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing lokal adalah informasi yang terkandung dalam rencana pembangunan daerah.



Gambar 2:: Alur Informasi Pembangunan Daerah Pada SIPD

Prosedur yang terdapat pada sistem pembangunan daerah ini diawali dengan pengumpulan data, mengisi dan juga mengevaluasi data SIPD yang

ada di pemerintah pusat. Selanjutnya, aplikasi SIPD akan mengolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintah daerah dapat mengelola data keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien melalui berbagai elemen yang relevan dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang relevan meliputi:

- a. Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- e. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
- f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.



| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN |
|---------------|--|------------------|
| 4 | PENDAPATAN | 4,612,675,000.00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4,612,675,000.00 |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 4,612,675,000.00 |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 42,515,000.00 |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 4,570,160,000.00 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 0.00 |
| 4.1.4.08 | Pendapatan Denda Retribusi | 0.00 |
| 5 | BELANJA | 4,198,515,300.00 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2,881,110,000.00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2,881,110,000.00 |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 2,074,610,000.00 |
| 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 806,500,000.00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 1,317,405,300.00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 176,520,000.00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 93,100,000.00 |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 56,900,000.00 |
| 5.2.1.03 | Uang Lembur | 26,520,000.00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,100,885,300.00 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 91,340,900.00 |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 36,125,000.00 |

Gambar 3: Tampilan hasil informasi keuangan daerah

Pengelolaan data keuangan daerah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan jabatan, khususnya keuangan daerah. Berdasarkan SK No. 12 Tahun 2018 tentang kodeferifikasi dan juga nomenklatur. Kode dan judul anggaran daerah dirinci dalam proses perencanaan dan dilaksanakan sesuai dengan itu, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan lebih cepat. Koding kegiatan nasional juga sangat bermanfaat dalam mengintegrasikan data keuangan daerah ke dalam sistem informasi pemerintah pusat, terutama dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Di bawah ini adalah contoh hasil sistem keuangan dalam SIPD.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya.

SIPD dapat memberikan informasi umum lainnya terkait tata kelola. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), PERDA, dan informasi umum lainnya yang diatur oleh berbagai unsur terkait.

- a. Informasi LPPD diperoleh dari pelaporan penyelenggaraan daerah yang berbasis elektronik.
- b. Informasi Peraturan Daerah diperoleh dari pelaporan hasil pembentukan Perda melalui pembentukan Perda yang dikelola secara elektronik.

2.3. Sistem Informasi Terhadap Kualitas Informasi

Kualitas sistem biasanya terfokus terhadap karakteristik kinerja sistem. Menurut DeLone dan McLean dalam Livari (2005) Kualitas sistem adalah fungsi kualitas yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan kualitas informasi yang diinginkan dari fungsi produk informasi. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas informasi mencakup beberapa di antaranya yaitu kemudahan untuk digunakan (ease of use), kecepatan akses (response time), keandalan sistem (reliability), fleksibilitas sistem (flexibility), dan keamanan sistem (security).

Untuk mengukur keberhasilan sistem informasi telah dilakukan oleh (Nursiam, 2019) menyimpulkan bahwa jika kualitas informasi dihasilkan oleh beberapa hal, termasuk 3 hal diantaranya:

- a. Informasi akurat dan tidak ambigu atau menyesatkan. Informasi tersebut harus memiliki tingkat akurasi tertentu sehingga pengguna tidak dapat meragukan keakuratannya. Karena pengguna atau pihak berhak mengambil keputusan atas hasil yang dicapai.
- b. Informasi yang disajikan kepada pengguna tepat waktu tidak boleh ditunda. Tidak ada penundaan karena informasinya tidak tepat waktu. Karena kami dapat mengirimkan beberapa informasi kepada Anda segera untuk mengambil keputusan.
- c. Dalam kehati-hatian ini, informasi yang direkomendasikan memiliki kegunaan yang dibutuhkan oleh pemain. Informasi memiliki relativitas yang berbeda tergantung pada tingkat penggunaannya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini sering digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, dan situasi secara sosial. Praktik umum lainnya adalah mengumpulkan, menyusun, mengkategorikan, dan menafsirkan masalah yang ada dalam gambaran yang jelas. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran yang akurat tentang kelompok dan menjelaskan mengenai masalah yang ada, untuk menggambarkan mekanisme proses atau hubungan, untuk memberikan gambaran lengkap dalam bentuk verbal atau numerik, untuk memberikan informasi dasar tentang hubungan tersebut, serta untuk menjelaskan rentang yang berbeda. Kategori dibuat dan diteliti untuk mengkategorikan mata pelajaran.

3.2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah sistem informasi pemerintahan yang digunakan di instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam melakukan pelaksanaan berbagai aktivitas selama 1 periode untuk menunjang beberapa aktivitas tahun 2022.

3.3. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak” maka perlu dijelaskan arti dari judul adalah sebagai berikut :

1. Analisis merupakan suatu upaya untuk memahami secara menyeluruh suatu hal yang akan diteliti.
2. Sebuah komponen organisasi yang dikenal sebagai sistem informasi dibuat untuk mengubah informasi keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan yang diarahkan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal bisnis. Pengetahuan dapat dibuat dengan mengolah data secara manual atau dengan menggunakan komputer.
3. Pemerintah Daerah adalah komponen pemerintahan daerah yang mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah berfungsi sebagai kepala daerah.
4. Sistem SIPD merupakan sistem yang mencatat, mengelola, dan mentransformasikan informasi pembangunan daerah menjadi data yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan digunakan sebagai sumber pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Demak adalah organisasi pemerintahan yang perannya cukup vital dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah. mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah komponen penting dari proyek penelitian karena akan menentukan apakah penelitian itu berhasil atau gagal. Jadi, penting untuk memilih metode pengumpulan data dengan hati-hati dan harus cermat. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Menurut (Sugiono, 2014) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Sedangkan menurut (Kriyantono, 2021) wawancara merupakan salah satu penelitian yang merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Secara umum wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

2. Studi Pustaka

Menurut (Sugiyono, 2019) seorang ahli di bidang penelitian menjelaskan, studi pustaka atau studi kepustakaan adalah suatu kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan juga norma yang berkembang di situasi sosial yang sedang diteliti. Menurut (Nanang, 2014) Studi pustaka merupakan metode untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai konsep yang akan menjadi landasan atau pedoman bagi proses penelitian, maka dilakukan studi literatur. Selain itu, peneliti menerapkan metode pengumpulan data dari studi literatur. Dengan mengumpulkan data dari buku, artikel, dan karya ilmiah dari studi sebelumnya, studi literatur adalah semacam data sekunder yang digunakan dalam metode pengumpulan data ini untuk mendukung proses penelitian.

Karena itu kami dapat membuat penilaian berdasarkan sudut pandang ahli yang disebutkan di atas. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk menemukan fakta dan memahami ide dibalik metodologi yang digunakan baik dari sumber buku, artikel, maupun karya ilmiah. Studi literatur adalah upaya atau proses yang melibatkan pengumpulan data berupa tulisan melalui publikasi, jurnal, artikel. Dalam metode ini peneliti memperoleh data dari sumber diantaranya artikel tentang peraturan bupati dalam web dan juga beberapa dokumen yang diberikan oleh pegawai bagian keuangan pada saat melakukan proses PKL tahun 2022.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu metode untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu objek, observasi melibatkan pemeriksaan secara cermat dan langsung. Definisi lain dari observasi yaitu diantaranya termasuk memilih, mengubah, mendokumentasikan, dan mengklasifikasikan sejumlah perilaku dan keadaan organisasi yang relevan sesuai dengan tujuan empiris. Pengamatan prapenelitian, selama penelitian, dan pascapenelitian yang digunakan sebagai metode bantu dengan tujuan pengamatan adalah pengamatan yang dimaksudkan dalam metodologi pengumpulan data ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari serta menyusun dengan cara sistematis data yang didapatkan dari hasil dokumentasi maupun wawancara, dengan mengatur dan mengolah data ke dalam kategori, menjelaskan secara unit ke unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dimana penjelasan tersebut dipahami oleh berbagai pihak (Sugiono, 2014). Teknik analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, pilih elemen kunci pokok, memperhatikan hal-hal yang penting, dan mencari kesamaan dan tren. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh di lapangan mengenai “reduksi data” Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dengan fokus tentang Sistem informasi yang digunakan dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Data yang diperoleh penulis didapat pada saat magang dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan sistem yang digunakan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data dirangkum kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data pada penelitian jenis kualitatif ini dilakukan dalam bentuk beberapa seperti penjelasan singkat, flowchart, bagan, dan sejenisnya. Penyajian data penelitian ini bermanfaat untuk lebih mempermudah penulis memahami informasi data yang diperoleh dilapangan. Dengan itu penulis dapat melihat kesiapan sistem informasi pemerintahan yang digunakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing Verification*)

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menyusun bukti-bukti dari suatu pernyataan sehingga terbentuk suatu kalimat singkat padat dan jelas dalam menjelaskan sebuah informasi. Kesimpulan data bertujuan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah disajikan dalam penjelasan awal dan kesimpulan biasanya berupa deskripsi, gambaran tentang suatu objek yang telah dilakukan penelitian dan dibahas.

BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Institusi

4.1.1. Sejarah Umum Institusi

Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Demak membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 yang membahas Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5). Petunjuk teknis dari pembentukan Bagian-bagian Setda Kabupaten Demak diatur dalam PERBUP Demak Nomor 29 Tahun 2008 yang menjelaskan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2008 dan diundangkan pada Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 35.

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak terletak di kawasan Demak Kota, tepatnya bersebelahan dengan Kantor Bupati Demak. Lokasinya strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Sekretariat Daerah Kabupaten Demak saat ini dipimpin oleh Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si., sebagai Sekretaris Daerah.

Dasar Hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Adapun data Sekretariat Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Nama Unit Kerja : Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Demak
- b. Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak,

Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019 (18 November 2019) dan diperbarui dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak.

- c. Alamat : Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak 59511
- d. Telepon : 0291 – 685322 / 0291 685625
- e. Email : setda@demakkab.go.id

4.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 terdiri dari:



Gambar 4: Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Demak

a. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati) Demak Nomor 64 Tahun 2021, sekretariat daerah bertugas membantu kinerja Bupati dalam penyusunan pembinaan pembinaan dan koordinasi administrasi untuk pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan administrasi organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c) Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan bagian-bagian dibawahnya diantaranya:
1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan dan mengatur bagian dibawahnya seperti:
1. Bagian Administrasi Pembangunan
 2. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
 3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- d. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan dan mengatur bagian dibawahnya seperti::

1. Bagian Umum yang membawahkan:
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang membawahkan Subbagian Protokol

4.1.3. Mekanisme Pengajuan SPP (Surat Pemerintah Pembayaran)

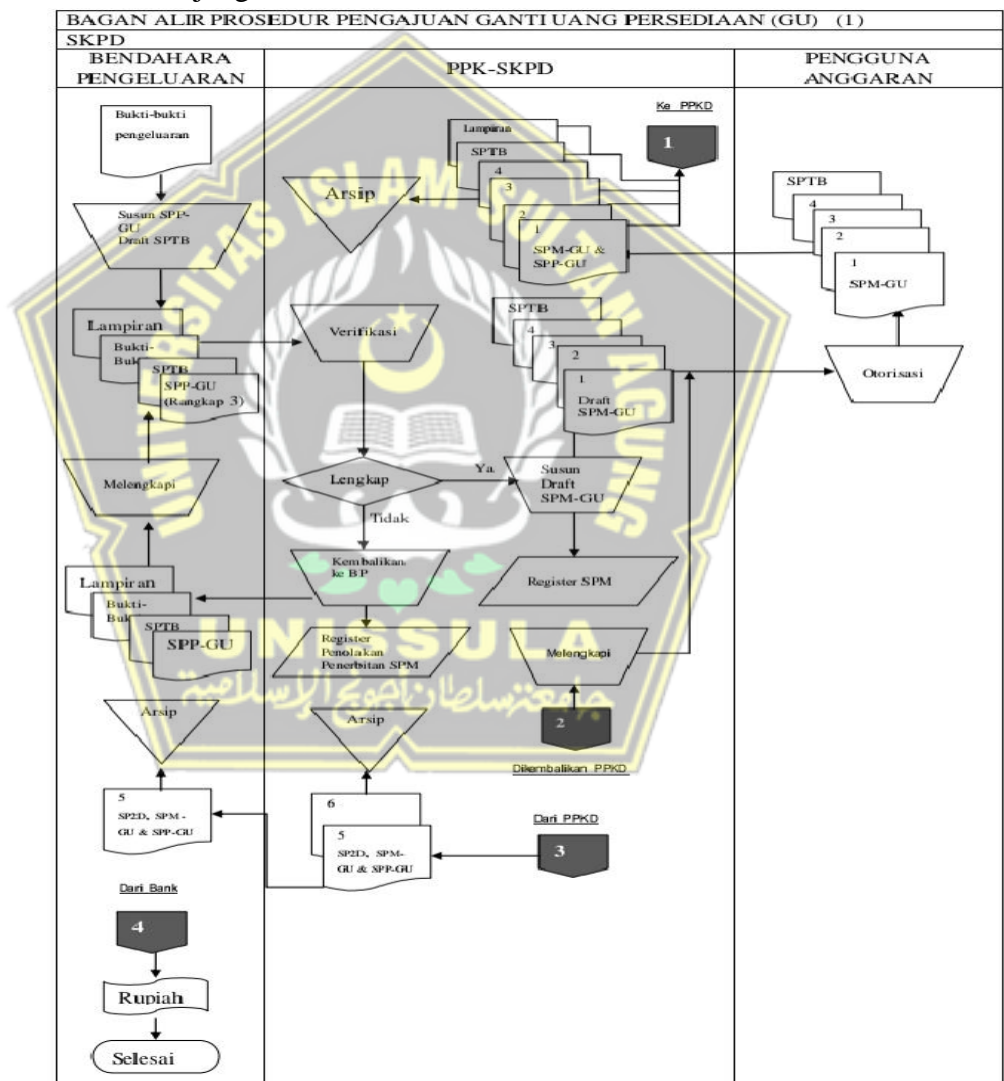
Sesuai dengan yang dibahas di Tugas Akhir (TA) ini, maka mendapatkan beberapa hasil pengamatan yang telah diperoleh tentang proses sistem yang berjalan yang digunakan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yaitu Sistem Informasi Pemerintahan dengan memuat beberapa transaksi tentang bagaimana proses pencairan dana untuk memenuhi pelaksanaan anggaran pada instansi OPD Sekretariat Daerah. Setelah disahkannya anggaran selanjutnya pelaksanaan suatu kegiatan sesuai RENJA (Rencana Kerja) dan anggaran. Berdasarkan SPD (Surat Penyediaan Dana) beberapa transaksi yang dilakukan bendahara SKPD yaitu mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beberapa diantaranya seperti:

1. Sistem Pergajuan SPP-UP

Uang Persediaan (UP) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran di muka untuk pekerjaan yang bersifat pengisian ulang dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP-UP disampaikan oleh bendahara pengeluaran setiap awal tahun anggaran dan hanya terjadi sekali dalam setahun tanpa pembebanan didalam kode rekening. Siklus pengeluaran UP (Uang Persediaan) membutuhkan beberapa pihak yang akan melakukan tugasnya masing-masing.

2. Sistem Pengajuan SPP-GU

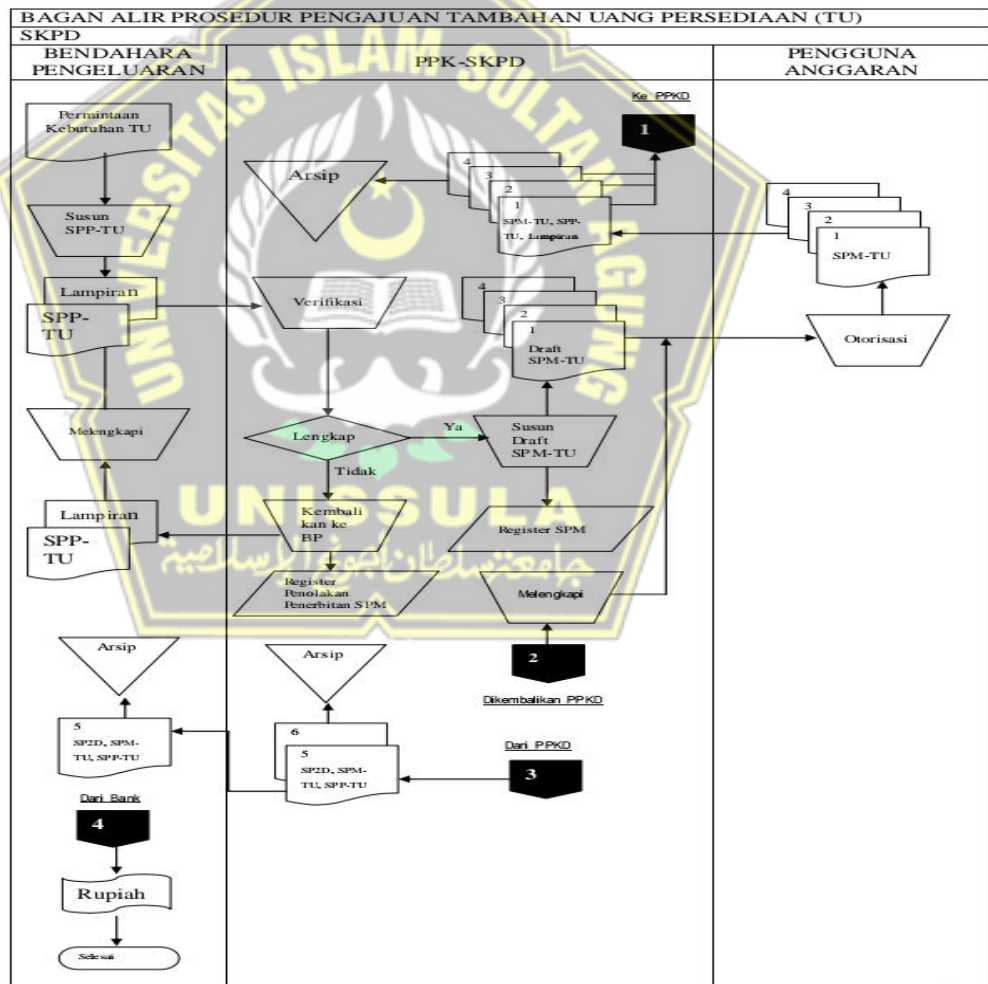
Ganti uang (GU) merupakan dokumen yang diserahkan oleh Bendahara pengeluaran terhadap pemegang anggaran untuk permintaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung, jika telah menggunakan uang persediaan (UP), maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU dan menyertakan Surat Pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang persediaan dalam jangka waktu tertentu.



Gambar 5: Alur Pengajuan SPP- GU

3. Sistem Pengajuan SPP-TU

Tambah Uang (TU) merupakan suatu dokumen yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk meminta tambah uang persediaan untuk menjalankan SKPD yang bersifat penting yang penggunaannya tidak dapat memanfaatkan pembayaran langsung dan uang persediaan. Tambah uang ini dilakukan jika dalam anggaran 1 tahun terdapat kebutuhan mendesak yang penting, akan tetapi anggaran yang terjadi tidak mampu mencukupi biayanya maka bendahara pengeluaran bisa melakukan pengajuan SPP-TU.



Gambar 6 : Alur Pengajuan SPP-TU

4.1.4. Hasil Pengamatan

Fokus dalam penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan Tugas Akhir tentang aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Perpres No. 12 Tahun 2019 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk mewujudkan SIPD yang akuntabel, efektif, dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi digital. SIPD akan digunakan oleh institusi mulai tahun 2020.

SIPD bagus karena bisa memuat informasi perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan penginformasian tentang kepemimpinan dan pengawasan daerah. SIPD ini bertujuan agar meningkatkan Kabupaten/Kota dengan memperkuat pelaksanaan pemerintah yang berkualitas, cepat serta inovatif. Adanya sistem yang digunakan pada instansi pada kenyataannya pasti belum ada sistem yang sempurna. SIPD merupakan sistem yang bisa digunakan untuk informasi perencanaan pembangunan akan tetapi sistem ini masi dibantu dengan SIMDA/Fmis untuk melakukan pencairan dana dan pentausahaan. Masih banyak terdapat kekurangannya pada SIPD sehingga banyak pekerjaan dan proses penginputan lainnya mengalami keterlambatan khususnya pada saat evaluasi rencana anggaran karena banyak data yang harus disiapkan. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang memadai dari masing-masing perangkat daerah agar permasalahan yang ada saat ini dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan tujuan SDM yang berkompeten agar tidak mengalami ketertinggalan dalam sistem.

4.1.5. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan saat pelaksanaan magang di Sekretariat Daerah terkait penggunaan sistem informasi yang digunakan berikut diantaranya:

1. Sistem yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Setda membutuhkan sistem untuk melakukan aktivitasnya dalam menyediakan data dan dengan ketentuan Kemendagri setda memanfaatkan aplikasi SIPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akurat, serta untuk informasi keuangan daerah juga sudah disediakan dalam aplikasi SIPD.

Dalam penggunaan SIPD Setda Kab. Demak juga memanfaatkan aplikasi lain yaitu SIMDA FMIS (Financial Management Information System). Seperti SIPD, SIMDA juga tidak jauh berbeda manfaatnya dengan SIPD. Akan tetapi SIMDA lebih menyediakan informasi tentang keuangan daerah seperti melakukan proses pencairan dana GU/TU. SIPD dimanfaatkan untuk melakukan proses perencanaan anggaran, akan tetapi pada saat perencanaan masih menemukan masalah dan mengalami keterlambatan pengumpulan dokumen yang disebabkan banyaknya bagian yang mengumpulkan dokumen tidak tepat waktu, sehingga mengakibatkan tim perencanaan melakukan penginputan yang cukup banyak di akhir.

2. Keefektifan sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Keefektifan sistem yang dimiliki oleh suatu instansi pastinya memiliki beberapa indikator yang akan digunakan untuk menilai dan membandingkan

apakah aktivitas yang dilakukan selama ini memenuhi beberapa indikator yang dimaksud agar sistem sesuai dengan keefektifannya. Oleh karena itu, berikut indikator dan juga aktivitas yang ditemukan dilapangan penggunaan SIPD.

Tabel 1: Perbandingan teori dengan praktek yang ditemukan dilapangan dan keefektifannya

| Komponen Sistem Informasi | Teori | Praktek Ditemukan Dilapangan | Kesimpulan |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hardware/ Perangkat Keras • Perangkat Lunak/ Software | <p>Hardware memuat fisik seperti monitor dan printer, computer.</p> <p>Software merupakan kumpulan perintah yang mengharuskan hardware melakukan pemrosesan data</p> | <p>Penggunaan sistem informasi yang digunakan Setda telah menggunakan hardware berupa computer dan laptop dengan pembagian satu per pengguna.</p> <p>Software pada setda menggunakan aplikasi SIPD yang juga bisa terhubung dengan excel untuk melakukan aktivitas yang berhubungan perencanaan dan juga penganggaran daerah.</p> | <p>Penggunaan computer yang digunakan pegawai memudahkan melakukan aktivitas dengan efisien. Ditambah setiap pegawai dibagi dengan computer masing-masing untuk menunjang kinerja.</p> <p>Aplikasi SIPD mempermudah pegawai melakukan pengecekan setiap waktu, mempersingkat pelaksanaan penganggaran dibandingkan dengan melakukan penganggaran manual karena otomatis adanya referensi.</p> |
| Prosedur | Prosedur adalah urutan langkah-langkah yang digunakan untuk | Prosedur yang ada dilakukan instansi diawali dengan pembuatan rancangan rencana dan | Adanya prosedur yang jelas membuat tim yang bersangkutan akan fokus dengan aktivitas dilakukan. |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| | melakukan pemrosesan data | diinput di SIPD. Prosesnya dari perencanaan, penganggaran hingga ke tahap pelaporannya. | Dan membuat aktivitas terorganisir dengan teliti. |
| Pengguna atau SDM | Pemakai yang bertanggung jawab atas pengembangan, pemrosesan, dan penggunaan sistem informasi | Pegawai dapat mengakses SIPD hanya pegawai /tim perencanaan. Dalam tim tersebut merupakan pilihan dari bagian keuangan dan memiliki pendidikan sarjana ekonomi dan sebagian telah PNS | Adanya pegawai yang bertanggung jawab SIPD dari bagian keuangan akan mempermudah melakukan aktivitas perencanaan dan penganggaran karena merupakan hal yang tidak asing dengan perhitungan. PNS menambah nilai plus dalam melakukan kegiatan tersebut karena memungkinkan bahwa SDM telah memenuhi |
| Data Base | Kumpulan data yang dihubungkan bersama dan disimpan dalam perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak | SIPD memberikan layanan untuk informasi yang telah dibuat seperti perencanaan dan penganggaran 1 tahun nantinya akan diinput untuk ditinjau perkembangan untuk 1 periode | Adanya data base yang tersedia di SIPD tim perencanaan lebih mudah melakukan pengecekan progres yang sudah dilakukan dalam 1 periode tersebut. Dan menganalisis bagaimana agar perencanaan tercapai sesuai tujuan yang sudah ada dengan melihat di database. |

3. Dampak Pemanfaatan Program

Suatu program semestinya memberikan sebuah kemajuan dan juga membuat suatu perubahan dilihat dari sebelumnya. Dengan itu dampak akan diberikan sistem untuk penggunaannya akan menambah nilai keefektifan dari sistem itu sendiri. Keefektifan sistem bisa dilihat dari bagaimana pelaksanaan program yang sudah berjalan itu berhasil atau memenuhi tujuan yang diharapkan. Jika dalam penggunaan sistem tidak menghasilkan perubahan maupun dampak positif dari pemanfaatannya untuk melaksanakan program maka sistem bisa dikatakan belum berhasil memenuhi tujuan dan belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dibidang penggaran yang menggunakan SIPD mengatakan bahwa dalam penggunaan SIPD selama ini dari tahun 2022-2022 mengalami adanya dampak yang cukup baik karena membuat perubahan dibandingkan sebelum menggunakan SIPD ini. Dampak dari penggunaan yang dimaksud yaitu seperti dalam perencanaan, penganggaran dan juga penatausahaan yang dulunya harus membuat dengan manual dan juga harus melakukan pekerjaan masing-masing tahapan. Dengan menggunakan SIPD tahapan tersebut bisa dengan cepat dihasilkan data yang diinginkan tanpa membuat tahapan manual, karena SIPD sudah merangkum segala kegiatan dari perencanaan serta penatausahaanya dalam aplikasi. Selain itu SIPD dalam melakukan proses perencanaan maupun penatausahaan di OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Demak terkoneksi langsung ke pusat membuat kegiatan pemantauan menjadi mudah dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk perencanaan, salah satunya adalah Sistem Informasi Administrasi Daerah “SIPD”. merupakan kewajiban mulai tahun 2020, Pasal 23 Ayat 391 UU 2014, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintah daerah yang dikelola dalam sistem informasi pemerintah daerah. Penggunaan SIPD ditonjolkan dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
2. Melihat dari beberapa indikator yang peneliti sampaikan didalam hasil pembahasan tentang SIPD dapat dihasilkan bahwa SIPD sudah cukup efektif. Akan tetapi dalam proses penginputan perencanaan sering mengalami keterlambatan dikarenakan banyaknya dokumen yang harus disiapkan dan penginputan dilakukan secara bersamaan.
3. Dampak setelah penggunaan SIPD untuk aktivitas instansi cukup baik diantaranya mempersingkat waktu dalam pengerjaan rencana pembangunan, penggunaan aplikasi lebih efisien karena bisa dicek sewaktu-waktu serta meminimalisir adanya kesalahan hasil laporan keuangan.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memberikan keterbatasan sebagai berikut:

1. Rentang data yang dimiliki penulis hanya membahas keterkaitan keefektifan aplikasi SIPD dan tidak membahas lebih detail dikarenakan akses aplikasi hanya diperbolehkan untuk pegawai terkait
2. Penulis tidak membahas dengan detail aplikasi pendukung lainnya yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
3. Penulis tidak banyak memiliki banyak data tentang awal perencanaan penganggaran dikarenakan penulis melakukan pengamatan pada pertengahan tahun dan hanya mengamati perubahan anggaran.

5.3. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ditambahkannya lagi tim perencanaan dan penganggaran untuk mempercepat proses verifikasi, karena perencanaan dan penggaran dibutuhkan banyak orang untuk memantau dan juga mempersiapkan data.
2. Pada tim perencanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dilakukan kembali sosialisasi serta pelatihan yang cukup agar dalam melakukan aktivitas sesungguhnya tidak mengalami penginputan data yang berlebihan dan dikumpulkan sesuai jangka waktu. Sosialisasi juga bisa agar pegawai bisa dapat mengatasi masalah umum selama proses perencanaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto, 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lestari, k. C., 2020. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).
- Maydianto, 2021. Rancangan Bangun Sistem Informasi Point Of Sale. *Jurnal Comasie*, p. 51.
- Nanang, M., 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kriyantono,R. (2021). *Teknik praktisi riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktisi skripsi, Tesis, dan disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi*, Rawangmangun:Prenadamedia Group.
- Sugiono, 2014. In: *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, D.T., & Nursiam. 2019. *Pengaruh Harga, Kualitas Informasi dan Keamanan Terhadap Keputusan Pembelian*
at:<https://publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Xmlui/Handle/11617/10789>, 160-178
- Wahyudi, 2019. *Sistem Informasi Penjualan Mobil Bekas Berbasis Web*. [Online] Available at:
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal/article/view/1565>
- Zakaria, M., 2022. *NESABAMEDIA*. [Online] Available at:
<https://www.nesabamedia.com/komponensisteminformasi>
[Accessed Februari 2022].